

## DAFTAR PUSTAKA

- Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *Mimbar*, Vol. 28, No. 2, 201-209.
- Dwiyanto, A. (2003). *Reformasi Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, Arifuddin, & Sahmuddin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 19 No. 2.
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa :Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Ekonomika-Bisnis*, 143-152.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi ketiga, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik, Suatu Sasaran Good Governenc. *Jurnal Akuntansi SEktor Pemerintahan Vol.2 No.1*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (Oktober 2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 273 – 288.
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 75. (2016). *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017*. Padang Pariaman.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37. (2007). *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 . (2014). *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.113 . (2014). *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Peraturan Nagari Kayutanam Nomor 01. (2017). *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kayutanam Tahun Anggaran 2017*. Padang Pariaman.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60. (2014). *Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 . (2010). *Tantang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05. (2009). *Tentang Pemerintahan Nagari*. Padang Pariaman.
- Putriyanti, A. (2012). *Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aglik, Kecamatan Grabang, Kibupaten Purwoejo*. Yogyakarta: Pustaka Universitas Negri Yogyakarta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulistiyani, A. T. (2011). *Memahami good governance: Dalam perspektif sumber daya manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sulistoni , G. (2003). *Fiqh Korupsi : Amanah Vs Kekuasaan*. Nusa Tenggara Barat: Somasi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23. (2014). *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43. (2014). *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa*. Jakarta.

Wiyanto, S. D. (2014). *Agar Dana Desa Terkawal*. *Kementrian Keuangan RI*.



